

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN SELAGAN RAYA KABUPATEN MUKOMUKO

Wpp Mellani
NPP. 29.0523

Asdaf Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu
zProgram Studi Kebijakan Publik
Email: wppmellanie29@gmail.com

ABSTRACT

Problem statement/background (GAP): Poverty remains the biggest problem in Indonesia. The Family Hope Program (PKH) is one of the policies used by government to overcome the problem. **Purpose:** of this study was to determine the implementation of PKH in Selagan Raya Regency, Bengkulu. **Method:** The research used a descriptive qualitative method with an inductive approach. The data collection through observation, interview and documentation. The theory used to analyze the implementation of PKH is Weimer and Vining in Subarsono (2005). **Result:** The research found that the implementation of PKH in Selagan Raya is still not well-implemented, especially for the indicator program purpose, accuracy target, technical clarity, economic and geographic conditions, implementation competency and implementation communication. The government needs to do more socialization regarding PKH to the community, and increased cooperation between government. **Conclusion:** The conclusion of this study is that the implementation of PKH policies is still not running optimally, there are still many people who do not know about PKH, lack of awareness of PKH recipients, lack of government supervision.

Keywords: policy implementation, poverty, Family Hope Program

ABSTRAK

Permasalahan/latarbelakang (GAP): Kemiskinan masih menjadi masalah terbesar di Indonesia. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. **Tujuan:** Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan PKH di Kabupaten Selagan Raya, Bengkulu. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan untuk menganalisis pelaksanaan PKH adalah Weimer dan Vining dalam Subarsono (2005). **Hasil temuan:** Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan PKH di Selagan Raya masih belum terlaksana dengan baik, terutama untuk indikator tujuan program, ketepatan sasaran, kejelasan teknis, kondisi ekonomi dan geografis, kompetensi pelaksanaan dan komunikasi pelaksanaan. Pemerintah perlu lebih banyak melakukan sosialisasi mengenai PKH kepada masyarakat, dan meningkatkan kerjasama antar pemerintah. **Kesimpulan:** kesimpulan penelitian ini yaitu pelaksanaan kebijakan PKH masih belum berjalan secara optimal, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui PKH, kurangnya kesadaran penerima PKH, kurangnya pengawasan pemerintah.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kemiskinan, Program Keluarga Harapan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah sosial yang sedang dialami pemerintah Indonesia adalah masalah kemiskinan. Bertahun-tahun Indonesia telah berjuang untuk bebas dari kemiskinan, kenyataannya sampai saat ini masih belum bisa terlepas dari masalah kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan merupakan salah satu faktor terbelakang yang menghambat pembangunan negara. Kemiskinan dapat memberikan efek sinergis pada tatanan sosial secara umum dan menjadi pintu gerbang masalah sosial lainnya. Suatu kelompok masyarakat yang belum mampu terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, tempat tinggal, Pendidikan dan Kesehatan akan jatuh dibawah garis kemiskinan.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pada Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dilihat dari pasal-pasal yang tercantum di atas, pemerintah diwajibkan membantu masyarakatnya dan memikirkan kesejahteraan masyarakatnya guna mencegah dan menanggulangi kemiskinan.

Harapan bangsa Indonesia yang diamanatkan dalam undang-undang dasar 1945 bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diperlukan upaya yang nyata dalam penanggulangan kemiskinan, maka pemerintah telah membuat sebuah program untuk mengatasi hal tersebut. Program dari pemerintah yang telah dijalankan terkait penanggulangan kemiskinan yaitu salah satunya program bantuan bersyarat yang disebut program keluarga harapan (PKH).

Sebagai upaya dalam penanggulangan kemiskinan, Kebijakan Program keluarga harapan di Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah awal mulanya pada tahun 2007. Program keluarga harapan diakses bagi keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak-anak. Akses ke fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan disekitar mereka. Manfaat dari PKH juga bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam menjaga kesejahteraan sosial.

Berdasarkan peraturan Menteri sosial nomor 1 tahun 2018 Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah dan berkelanjutan dalam bentuk program keluarga harapan sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Penyaluran bantuan PKH sebagai salah satu pengentasan kemiskinan dan kesenjangan dengan mendukung perbaikan aksesibilitas terhadap layanan Kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan.

Kabupaten Mukomuko merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu yang belum terlepas dari kasus kemiskinan. Berdasarkan data publikasi Badan Pusat Statistik Jumlah penduduk Kabupaten Mukomuko tercatat sebanyak 190.498 jiwa yang sebagian besar bermata pencaharian petani. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mukomuko sebesar 23.100 jiwa atau 11,72 % dari jumlah penduduk Kabupaten Mukomuko. Lebih tinggi dibandingkan dengan presentase kemiskinan nasional yaitu

9.82%. Dengan tingginya presentase kemiskinan di Kabupaten Mukomuko perlu adanya upaya penanganan langsung dari pemerintah terkait masalah tersebut.

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan yaitu salah satunya melalui pemberian bantuan sosial dalam bentuk program keluarga harapan (PKH). Dana dari PKH disalurkan secara bertahap setiap 3 bulan sekali. Melalui program ini diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat miskin. Pelaksanaan PKH telah terlaksana di semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Mukomuko yang terdiri dari 15 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Selagan Raya. Jumlah penduduk Kecamatan Selagan Raya pada tahun 2021 tercatat sebanyak 11.126 jiwa. Jumlah keluarga miskin di Kecamatan Selagan Raya tercatat sebanyak 2.781, dengan komponen penerima manfaat (KPM) terbanyak dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Mukomuko.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu masih ada keluarga penerima manfaat yang belum memperoleh dana bantuan PKH, karena pengaruh dari migrasi data sosial di instansi dukcapil. Data seperti IKTP dan kartu keluarga milik KPM yang masih bermasalah dan belum terkoneksi dengan database dukcapil, sehingga dana tersebut belum dicairkan oleh Kementerian.

kemudian penulis temukan dalam penelitian terkait pelaksanaan kebijakan PKH di Kecamatan Selagan Raya, Kurang nya pengawasan dan tindakan langsung dari pemerintah terkait PKH ini kepada anggota PKH. Masyarakat banyak yang tidak mengetahui tujuan dari PKH. Masih kurangnya kesadaran dari anggota penerima PKH sehingga bantuan yang diberikan malah disalahgunakan oleh keluarga penerima manfaat dari ketentuan yaitu untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. permasalahan lainnya yang ditemukan penulis yakni berdasarkan petunjuk teknis penyaluran bantuan non tunai PKH yaitu bantuan diberikan dalam bentuk uang yang dikirim langsung ke rekening para penerima bantuan PKH. Namun di Kecamatan Selagan Raya bantuan PKH tidak hanya dikeluarkan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk sembako. Sehingga bantuan tersebut tidak bisa digunakan oleh penerima manfaat untuk fasilitas pendidikan dan kesehatan. Selain itu masyarakat yang terdaftar di pusat sebagai masyarakat miskin namun bukan penerima manfaat PKH tidak akan mendapatkan bantuan dari PKH, tetapi yang terdaftar anggota PKH tetap akan mendapatkan bantuan sosial lainnya yang di berikan dari dinas sosial seluruh masyarakat miskin yang sudah terdaftar di pusat. Sehingga penerima manfaat PKH mendapatkan bantuan *double* dari pemerintah, hal ini menyebabkan rasa cemburu antara masyarakat yang bukan anggota PKH dengan masyarakat penerima PKH.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Clara dheby, DKK. berjudul Implementasi PKH di Kecamatan Tamalate kota Makassar (Clara dheby, dkk (2017), menemukan bahwa PKH di bidang kesehatan di Kecamatan Tamalate, telah memberikan hasil yang baik dan menjadi solusi bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Dalam bidang pendidikan belum memberikan pengentasan yang maksimal. Penelitian Agnes Pradina S. (2019) yang berjudul Implementasi kebijakan PKH dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Kluwut Kecamatan

Bulukamba Kabupaten Brebes, menemukan bahwa penelitian berjalan dengan baik, berpotensi meningkatkan taraf hidup peserta PKH melalui akses Pendidikan dan layanan Kesehatan. Penelitian Gabriella Kristiany Sitorus, Joyce.J Rares, Novva N. Plagiten(2020) berjudul Pengaruh implementasi PKH terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, menemukan bahwa Implementasi bisa dikatakan sudah berhasil, kesejahteraan masyarakat kinilow bergerak kearah positif, penerima PKH mengalami penurunan, dan dapat mengurangi angka kemiskinan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengenai implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Selagan raya Kabupaten Mukomuko. Metode yang digunakan juga berbeda dengan penelitian Agnes, Gabriella dan Clara Dheby. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Weimer dan Vining dalam subarsono (2005;103-104) yang menyatakan bahwa keberhasilan Implementasi dapat dilihat pada tiga dimensi yaitu logika kebijakan, tempat kebijakan di operasionalkan, dan kemampuan implementor.

1.5. Tujuan.

- a. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan selagan raya.
- b. Mengetahui dan mendeskripsikan apa faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan program keluarga harapan untuk menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Selagan Raya.
- c. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana upaya dalam mengatasi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan program keluarga harapan di Kecamatan Selagan Raya

II. METODE

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu untuk menjawab permasalahan dengan melakukan pemahaman yang mendalam secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti guna mendapatkan kesimpulan yang bersifat deskriptif sesuai dengan kondisi dan waktu. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 15 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, Camat Kecamatan Selagan Raya, koordinator PKH Mukomuko, kepala desa, pendamping PKH, penerima bantuan PKH. Adapun analisisnya menggunakan teori Weimer dan Vining dalam subarsono (2005;103-104).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko.

Implementasi kebijakan program keluarga harapan dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko, penulis melakukan analisis berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan terkait PKH di Kecamatan Selagan Raya. Wawancara dilakukan seputar pelaksanaan PKH, faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut sesuai teori yang digunakan adalah menurut Weimer dan Vining dalam Subarsono (2005:103-104) yaitu dengan 3 faktor variabel yang sesuai dengan konsep pelaksanaannya, yakni: Logika Kebijakan, Lingkungan Tempat Kebijakan dioperasionalkan dan Kemampuan Implementor Kebijakan.

1. Logika Kebijakan

Logika kebijakan disini adalah dibentuknya suatu program untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam memecahkan permasalahan program tersebut haruslah masuk akal dan mendapatkan dukungan teoritis.

a. Kesesuaian Tujuan Program

Dalam mencapai Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari kesesuaian penggunaan tujuan program tersebut dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Agar mencapai tujuan masyarakat harus bergerak ke arah yang sama dengan aturan yang ada. Berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mencapai kesesuaian tujuan program di Kecamatan Selagan Raya dapat dilihat dari bagaimana masyarakat penerima manfaat menggunakan dana bantuan PKH tersebut apakah untuk kesehatan maupun pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Camat Kecamatan Selagan Raya (2022), menyatakan bahwa penggunaan bantuan PKH telah sesuai ketentuan, namun masyarakat masih ada yang lupa tujuan PKH yaitu untuk pendidikan dan kesehatan, akibatnya dana PKH dipergunakan untuk keperluan lain. Pernyataan camat juga didukung oleh kepala desa (2022), yang menyatakan bahwa beberapa anggota keluarga penerima manfaat PKH di Kecamatan Selagan Raya sudah menggunakan bantuan PKH sesuai dengan ketentuan, tetapi masih ada beberapa KPM yang tidak menjalani perintah dan menganggap bantuan dari pemerintah bebas digunakan sesuai keinginan mereka. Hal yang sama juga diungkapkan oleh penerima manfaat PKH (2022), menyampaikan bahwa bantuan PKH digunakan untuk Kesehatan dan Pendidikan, digunakan untuk biaya sekolah. Namun ada KPM lain, bantuan PKH digunakan untuk membeli emas dan ada juga dijadikan tabungan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan dapat disimpulkan bahwa penggunaan bantuan PKH di Kecamatan Selagan Raya masih belum optimal. Kurangnya kesadaran dari masyarakat mengenai tujuan utama dari penggunaan bantuan tersebut yaitu untuk pendidikan dan Kesehatan. masih ada yang menggunakan bantuan PKH untuk keperluan di luar ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga penggunaan dana tersebut belum sepenuhnya sesuai tujuan program.

b. Ketepatan sasaran

sasaran program merupakan target atau tujuan pemerintah yang ingin dijadikan sebagai peserta penerima program keluarga harapan di Kecamatan Selagan Raya dengan maksud agar program tersebut dapat membantu masyarakat miskin atau yang kurang mampu yang ada di Kecamatan Selagan Raya. Ketepatan sasaran yaitu dilihat dari sejauh mana peserta program keluarga harapan tepat dengan sasarnya yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian ini ketetapan penentuan peserta penerima bantuan PKH adalah keluarga sangat miskin (KSM) yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditentukan berdasarkan beberapa kriteria.

Untuk mengetahui apakah sasaran dari program sudah tepat sesuai dengan kriteria penerima manfaat PKH penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan. Hasil wawancara yang disampaikan oleh Camat Kecamatan Selagan Raya (2022), mengatakan bahwa peserta penerima program PKH di Kecamatan Selagan Raya belum sepenuhnya tepat sasaran, dilihat dari adanya peserta yang sudah memiliki ekonomi yang baik, sudah mampu membeli kendaraan namun masih terdaftar sebagai peserta penerima program keluarga harapan di data pusat. Seperti yang disampaikan juga oleh Kepala Desa Kecamatan Selagan Raya (2022), menyatakan bahwa kegiatan validasi data tidak dilakukan pengurangan jumlah peserta untuk penerima PKH namun dilakukan penambahan. Di sebabkan KPM PKH tidak mau dikeluarkan dari daftar peserta PKH walaupun sudah mampu. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis di Iapangan disimpulkan bahwa di Kecamatan Selagan Raya tidak ada pengurangan jumlah peserta PKH dan dilakukan penambahan untuk jumlah penerima PKH dari data yang lama. Sehingga ketepatan sasaran program PKH ini menjadi tidak berjalan sesuai harapan, dapat dilihat juga dari Pemerintah desa yang masih kurang tegas dengan masyarakatnya dalam menuliskan data riil KPM yang layak mendapatkan bantuan PKH. Masih ada masyarakat yang tidak mematuhi aturan yang ditetapkan berdasarkan program PKH ini. Masyarakat yang terlalu bergantung dengan bantuan pemerintah tidak peduli dengan ekonomi yang sudah meningkat di keluarganya, dan mereka tetap meminta di daftarkan sebagai KPM.

c. Kejelasan Teknis

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan sosial diwujudkan dengan prinsip yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat administrasi. Untuk teknis penyaluran bantuan program keluarga harapan yaitu bantuan PKH di cairkan dalam bentuk non tunai, dengan dana yang diterima masing-masing komponen PKH telah diatur sesuai jumlah masing-masing, jumlah yang diterima seperti yang telah dilampirkan pada tabel 4.4 jumlah bantuan dana pertahun. Transaksi penarikan dana PKH dilakukan di E-Warung/Agen Bank/di ATM yang telah dikirim ke masing-masing rekening KPM (Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial, 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis di Iapangan disimpulkan bahwa program keluarga harapan di Kecamatan Selagan Raya sudah dilaksanakan sesuai teknis penyaluran yaitu bantuan dicairkan dalam bentuk non tunai yang dikirim langsung kepada rekening setiap anggota KPM, namun dalam penyaluran jumlah dana yang dikeluarkan masih belum tepat, dimana jumlah yang diperoleh oleh keluarga penerima manfaat berkurang dari jumlah yang seharusnya di terima.

2. Lingkungan tempat kebijakan di operasionalkan

Lingkungan kebijakan adalah tempat suatu kebijakan dilaksanakan. Lingkungan kebijakan merupakan segala sesuatu yang mempengaruhi pembentukan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan dari sejauhmana lingkungan kebijakan tersebut mampu menerima kebijakan yang ditetapkan.

a. Kondisi Sosial

Keberhasilan Program keluarga harapan di Kecamatan Selagan Raya didukung oleh kondisi sosial masyarakatnya. kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Selagan Raya masih banyak yang belum sejahtera dan berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, untuk menjadi peserta PKH kondisi sosial menjadi pedoman untuk penentuan penerima program keluarga harapan.

Berdasarkan dokumentasi dan observasi penulis di lapangan penerima program keluarga harapan di Kecamatan Selagan Raya merupakan masyarakat yang memiliki kondisi sosial yang masih belum sejahtera dengan kondisi rumah yang layak untuk mendapatkan bantuan PKH. Kondisi sosial masyarakat sangat mempengaruhi dalam penetapan untuk peserta yang berhak menerima bantuan PKH.

b. Kondisi Ekonomi

Pelaksanaan program keluarga harapan bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan membantu ekonomi masyarakat miskin dan tidak mampu. Kondisi ekonomi masyarakat Kecamatan Selagan Raya sudah sangat terbantu dengan adanya bantuan PKH Dan Sudah sangat memberikan pengaruh kepada masyarakat yang belum mampu, namun kondisi ekonomi juga tidak menjadi tolak ukur dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa yang sudah memiliki ekonomi yang baik sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan PKH.

Seperti hasil wawancara dengan kepala desa menyatakan bahwa Kondisi ekonomi masyarakat tidak mempengaruhi penerima PKH. Bagi masyarakat penerima PKH yang ekonominya sudah cukup baik bahkan sudah mampu seharusnya tidak layak lagi menerima PKH, namun kesadaran dari masyarakat yang masih sangat kurang, dengan perubahan ekonomi yang membaik tidak memberikan pengaruh atas keinginan mereka untuk tetap menerima bantuan PKH. Bahkan KPM yang sudah mampu, memiliki rumah yang bagus, pendapatan yang mencukupi, bahkan sudah memiliki mobil. Rumah KPM PKH yang sudah memiliki mobil.



Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis, 2022

Berdasarkan dokumentasi dan observasi di lapangan kondisi ekonomi masyarakat tidak mempengaruhi para KPM yang sudah mampu, dengan adanya PKH masyarakat menjadi ketergantungan dengan bantuan pemerintah, KPM yang tidak layak menerima bantuan PKH tidak memiliki kesadaran untuk mengeluarkan diri dari peserta PKH. seperti sudah bisa membeli kendaraan bahkan sudah ada 2 (dua). Hal ini menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan sesuai harapan yang hendak di capai.

c. **Kondisi Geografis/Fisik**

Luas wilayah Kecamatan Selagan Raya 339 Km², Dengan jarak masing-masing desa bervariasi terhadap jarak ibu kota kecamatan. Hal ini memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan program keluarga harapan di Kecamatan Selagan Raya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan kondisi geografis yang tidak mendukung sehingga penyelenggara mengalami kesulitan yang disebabkan jarak yang jauh antar daerah satu dengan lainnya. hal ini mengakibatkan program keluarga harapan tidak berjalan secara optimal.

3. Kemampuan Implementor Kebijakan

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan program dapat dipengaruhi oleh tingkat keterampilan dan kompetensi yang dimiliki para implementor kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan adalah kemampuan implementor yang belum mencukupi, memadai bahkan tidak berkompeten dibidangnya. Keahlian dan kemampuan sangat diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas sesuai yang diharapkan dalam kebijakan. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan implementor kebijakan kepada pendamping PKH di Kecamatan Selagan Raya.

a. **Keterampilan Implementor**

Keterampilan pendamping merupakan hal penting dalam penentu Keberhasilan implementasi kebijakan program keluarga harapan ini. Keterampilan yang dimiliki para pendamping program keluarga harapan di Kecamatan Selagan Raya sudah cukup baik.

Hal ini didukung oleh penyampaian hasil wawancara dengan kepala Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko (2022), mengungkapkan bahwa keterampilan yang dimiliki implementor Sudah cukup baik, karena para pendamping ini berasal dari rekrutan kementerian yang harus begelar sarjana. Para pendamping ini juga sudah diberikan pelatihan ke beberapa provinsi bahkan ke pusat, biasanya dilakukan 1 bulan sekali kadang juga 3 bulan sekali, dan juga kadang 1 tahun sekali. Mereka ini juga sudah mendapatkan sertifikat keahlian dalam bidang sosial.

b. Kompetensi Implementor

Kompetensi implementor dalam pelaksanaan kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan diperlukan aparat pelaksana yang memiliki pengetahuan yang didukung oleh sikap kerja yang berkompeten dalam mencapai tujuan suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan kompetensi yang dimiliki oleh implementor belum terlaksana dengan optimal, masyarakat masih sangat perlu diperhatikan oleh pendamping dalam pelaksanaan program keluarga harapan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Namun pendamping PKH tidak melaksanakan kewajiban sesuai tupoksinya, masih sering terjadi kendala bagi KPM yang tidak di selesaikan hingga tuntas. Jarak tempat tinggal pendamping dengan wilayah dampingan jauh, hal ini menyebabkan monitoring jarang dilakukan terhadap para KPM di lapangan.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program Program keluarga harapan di Kecamatan Selagan Raya memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat dalam rangka mensejahterakan masyarakat miskin. Program keluarga harapan sudah sangat membantu ekonomi masyarakat miskin dalam bidang Pendidikan dan Kesehatan. Sama halnya dengan temuan Agnes Pradina S. (2019), Hasil penelitian berjalan dengan baik, berpotensi meningkatkan taraf hidup peserta PKH melalui akses Pendidikan dan layanan Kesehatan. Layaknya program lainnya, proram keluarga harapan ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah Kurang nya pengawasan dan tindakan langsung dari pemerintah terkait PKH ini kepada anggota PKH. Masyarakat banyak yang tidak mengetahui tujuan dari PKH. Masih kurangnya kesadaran dari anggota penerima PKH sehingga bantuan yang diberikan malah disalahgunakan oleh keluarga penerima manfaat dari ketentuan yaitu untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. layaknya temuan clara deby yakni kebijakan belum terlaksana dengan baik Program-program yang dicanangkan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan supaya menjadi lebih baik namun tidak terlaksana secara maksimal, bantuan malah digunakan untuk keperluan keluarga dibidang lainnya. Adanya program ini juga diharapkan mampu untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah dan berkelanjutan dalam bentuk program keluarga harapan sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Penyaluran bantuan PKH sebagai salah satu pengentasan kemiskinan dan kesenjangan dengan mendukung perbaikan aksesibilitas terhadap layanan Kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat yaitu kecemburuan sosial antara keluarga sangat miskin (KSM) yang tidak menerima PKH dengan KSM yang menerima bantuan PKH, Masyarakat masih belum maksimal pemahamannya terkait PKH, Masih banyak masyarakat miskin yang belum menjadi peserta PKH, Kesadaran dari masyarakat yang sangat kurang dan terlalu bergantung dengan bantuan pemerintah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Selagan Raya

Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Selagan Raya dapat dikatakan belum optimal, hal ini dapat dilihat dari ketiga dimensi penelitian menurut Weimer dan Vining dalam Subarsono (2005:103-104) yang masih perlu ditingkatkan. Seperti pada dimensi logika kebijakan pada indikator kesesuaian tujuan program yaitu dana PKH tidak digunakan sesuai tujuan yaitu untuk kesehatan dan pendidikan. Pada indikator ketepatan sasaran yakni masih terdapat KPM PKH yang sudah mampu dan tidak layak menerima PKH tetapi masih mendapatkannya. Sedangkan jumlah KPM tidak dilakukan pengurangan dari data penerima PKH lama. Pada kejelasan teknis yang diterima dana yang diterima oleh KPM tidak sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran bantuan PKH. Pada dimensi lingkungan tempat kebijakan dioperasionalkan pada indikator kondisi ekonomi yaitu peserta KPM yang sudah mampu dan memiliki rumah yang bagus bahkan memiliki kendaraan masih terdaftar sebagai KPM PKH. Pada indikator kondisi geografis yaitu jarak wilayah kerja pendamping dengan alamat tempat tinggal yang jauh sehingga kunjungan dan sosialisasi kepada peserta KPM PKH jarang dilakukan. Sedangkan pada dimensi kemampuan implementor, pada indikator kompetensi implementor yaitu masing-masing pendamping telah memiliki kompetensi pendidikan dan telah diberikan keterampilan yang mumpuni mengenai program PKH, hanya saja pada saat pelaksanaan tugas di lapangan belum diaplikasikan secara optimal. Pada indikator komunikasi implementor, masih kurangnya pemahaman KPM tentang PKH karena sosialisasi yang jarang dilakukan oleh pendamping.

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Selagan Raya

Faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan PKH di Kecamatan Selagan Raya adalah kecemburuan sosial yang terjadi antara KSM yang tidak menerima PKH dengan KSM yang menerima bantuan, pemahaman yang masih kurang tentang PKH, masih banyak masyarakat miskin yang belum terdaftar PKH, pendataan peserta PKH yang bertambah tanpa mengalami pengurangan.

C. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Selagan Raya

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat yaitu dengan cara pendamping kecamatan rutin melakukan monitoring serta sosialisasi kepada peserta penerima bantuan tentang PKH begitupun

kepada masyarakat umum. Camat dan desa memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa pendataan peserta bantuan dilakukan oleh pihak pusat dengan melalui koordinasi dengan BPS dengan data yang diperoleh dari PPLS, apabila ada KSM yang berkeinginan menjadi peserta PKH dapat melakukan koordinasi dengan desa dan meminta surat pengaduan yang nantinya diserahkan kepada pendamping yang akan di serahkan pada operator PKH untuk dikirim ke UPPKH pusat sebagai sumber data PPLS. Kemudian desa harus bersikap tegas dalam menghadapi masyarakatnya yang menolak untuk dikeluarkan dari peserta PKH.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kecamatan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Weimer Dan Vining.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan dalam penanggulangan kemiskinan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Sosial dan Camat Kecamatan Selagan Raya beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Gabriella Kristiany Sitorus, Joyce.J Rares, Novva N. Plagiten(2020), Pengaruh implementasi PKH terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon

Agnes Pradina S. (2019) yang berjudul Implementasi kebijakan PKH dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Kluwut Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes

Clara dheby (2017), DKK. berjudul Implementasi PKH di Kecamatan Tamalate kota Makassar

Utomo dedi (2020), pelaksanaan program keluarga harapan dalam meningkatkan kualitas hidup rumah tangga miskin

Anggrieni londah. (2018), implementasi program keluarga harapan di kecamatan pasan kabupaten minahasa tenggara.